Kerangka Acuan

Penyusunan Rencana Kelola Sosial HPH di Kecamatan Kelay dengan Menggunakan Pendekatan SIGAP

Kontrak Pekerjaan:

Kontraktor diminta untuk membantu penyusunan Rencana Kelola Sosial untuk perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang berlokasi di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Rencana ini mencakup kelola sosial untuk 5 kampung yang terletak di dalam dan di sekitar konsesi perusahaan, dan harus memuat aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kesepakatan mengenai pengelolaan areal-areal di dalam konsesi WBPU, termasuk areal-areal penting bagi masyarakat seperti hutan adat
2. Kesepakatan mengenai program kerjasama antara perusahaan dan masyarakat
3. Rencana pelibatan kelompok perempuan dan pemuda
4. Tata waktu dan pembagian peran dan tanggungjawab
5. Penanganan keluhan/perselisihan

Latar Belakang:

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah lembaga non-pemerintah berbasis ilmu pengetahuan yang telah ada di Indonesia sejak tahun 2014. YKAN memiliki misi untuk melindungi daratan dan perairan sebagai penyangga utama kehidupan, dengan cara memberikan solusi-solusi inovatif untuk membnagun harmoni antara manusia dan alam melalui pengelolaan sumber daya alam yang efektif. YKAN bekerja dengan memprioritaskan pendekatan non-konfrontatif, dan membangun jaringan/kemitraan dengan semua pemangku kepentingan demi Indonesia yang lestari.

Rencana Kelola Sosial HPH Kecamatan Kelay

Pengelolaan Hutan Lestari adalah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh YKAN bersama mitranya – *The Nature Conservancy* (TNC) – selama 20 tahun terakhir di Kalimantan Timur. Tujuan dari pendekatan ini adalah mendorong pengelolaan hutan produksi yang meminimalisir dampak negatif terhadap iklim, memaksimalkan dampak konservasi dan dampak sosial. YKAN percaya bahwa dalam mencapai tujuan ini, pengelola konsesi hutan wajib berkolaborasi dengan masyarakat adat dan lokal, karena masyarakat memiliki peranan kunci dalam mencegah perubahan iklim, menjalankan konservasi hutan, dan melakukan perubahan sosial. Penyusunan Rencana Kelola Sosial ini adalah proses untuk memfasilitasi kolaborasi antara pengelola konsesi dengan masyarakat adat yang hidup di sekitar konsesi. Proses ini perlu merujuk pada pendekatan SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan), *The Nature Conservancy's Human Rights Principles*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan Hutan Produksi.

Pengalaman Konsultan:

1. Pengetahuan dan pengalaman praktis dalam isu pengembangan kapasitas masyarakat (*community development*)
2. Pengetahuan, kedekatan dan pengalaman praktis dalam menerapkan pendekatan SIGAP
3. Pengetahuan/kedekatan dengan konteks pengelolaan hutan produksi seperti Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), peraturan multi-usaha, dan legalitas lainnya
4. Keahlian dalam melakukan fasilitasi, utamanya untuk masyarakat adat dan lokal
5. Pengetahuan/kedekatan dengan isu-isu tata kelola kampung termasuk penyusunan rencana kerja dan anggaran kampung
6. Pengetahuan/kedekatan dengan prinsip-prinsip hak masyarakat adat dan lokal, serta *Free Prior Informed Consent*
7. Pengetahuan/kedekatan dengan konteks masyarakat adat di Kalimantan Timur, utamanya di Kelay, akan menjadi nilai tambah yang sangat besar
8. Kemampuan menulis laporan yang sangat baik dalam Bahasa Indonesia, sehingga laporan akan mudah dimengerti dan dimanfaatkan oleh YKAN dan perusahaan terkait

Ruang Lingkup Pekerjaan:

Kontraktor akan bekerja selama 4 – 5 bulan untuk menyusun Rencana Kelola Sosial bersama dengan YKAN, 1 perusahaan HPH yang berlokasi di Kelay, dan Masyarakat Map'nan yang tinggal di 5 kampung yang berlokasi di sekitar perusahaan.

Dokumen Rencana akan menjadi rujukan penyusunan/revisi RKU dan RKT perusahaan, serta menjadi panduan utama kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat. Beberapa studi/dokumen lain yang akan menjadi rujukan dalam proses penyusunan rencana ini adalah:

- Dokumen RKU dan RKT perusahaan
- Rencana dan Realisasi Laporan Kegiatan Kelola Sosial Perusahaan di tahun berjalan
- Laporan Kegiatan Pendampingan SIGAP di 5 Kampung
- Hasil pemetaan Rencana Tata Guna Lahan (RTGL) dan Sistem Informasi Kampung yang pernah disusun oleh masyarakat bersama YKAN dan kontraktornya
- Hasil Studi Dampak Sosial terhadap rencana operasional perusahaan
- Kesepakatan FPIC antara perusahaan dengan masyarakat
- Rencana kerja dan anggaran kampung

Dengan berbagai rujukan di atas, kesepakatan ini akan mempertemukan kebutuhan perusahaan dan masyarakat untuk mencapai tujuan/visi misi pengelolaan hutan lestari yaitu produksi kayu dan non-kayu yang meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, serta memaksimalkan dampak positif terhadap konservasi dan dampak sosial. Dokumen ini harus mencakup antara lain:

1. Kesepakatan mengenai pengelolaan areal-areal yang berada di dalam konsesi PT WBPU. Hal-hal ini dapat berarti:
 - Rencana perlindungan areal yang bernilai konservasi tinggi seperti tempat keramat dan tempat-tempat yang dilindungi oleh masyarakat di antaranya : batu jadi, kuburan, sepan, dan rumpun sagu

- Rencana penerapan RIL-C di areal RKT perusahaan yang juga menjadi tempat berburu masyarakat
2. Kesepakatan mengenai program kerjasama antara perusahaan dan masyarakat, yang mencakup setidaknya:
 - Program peningkatan kapasitas dan ekonomi. Jika memungkinkan, program-program ini disinergikan dengan rencana produksi/bisnis kayu dan non-kayu yang dimiliki oleh perusahaan.
 - Program *Company Social Responsibilities* (CSR) di luar program peningkatan kapasitas dan ekonomi yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
 - Pembagian keuntungan dalam bisnis kayu sesuai mandat peraturan kehutanan
 3. Rencana pelibatan kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok lainnya yang dirasa/disepakati sebagai kelompok rentan. Program-program yang telah disepakati juga harus mempertimbangkan unsur *gender mainstreaming* dalam pelaksanaannya
 4. Kesepakatan mengenai tata waktu serta pembagian peranan dan tanggung jawab antara perusahaan dan masyarakat dalam menjalankan program-program yang telah disepakati
 5. Proses penanganan keluhan/penyelesaian perselisihan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Metode

Proses partisipatif harus dilakukan di masing-masing kampung. Metode yang dijalankan untuk menyusun Rencana ini adalah proses partisipatif dengan masyarakat (lokakarya, *one on one discussion*, *Focus Group Discussion*, *key informant interview* dan lain-lain). Pelibatan masyarakat dalam perencanaan wilayah kelola sosial HPH dilakukan dengan menggunakan kerangka metodologi SIGAP.

Keluaran

Keluaran akhir dari kegiatan ini adalah 5 dokumen Rencana Kelola Sosial untuk masing-masing kampung yang akan diintegrasikan dengan RPJMK masing-masing kampung

Lokasi Kegiatan:

Kunjungan ke wilayah kegiatan harus dilakukan yakni di lima kampung yang berlokasi di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Keluaran & Rencana Pembayaran:

Keluaran	Tata Waktu (perkiraan)	Rencana Pembayaran
Rencana kegiatan yang mencakup metodologi/pendekatan dan anggaran yang telah disepakati	Maret 2023	30%
<i>Minutes of Meetings</i> Lokakarya di 5 kampung	Mei 2023	40%
Dokumen Rencana Kelola Sosial yang sudah disetujui	Juli 2023	30%

Prosedur Pendaftaran:

Individu/organisasi yang tertarik dengan pekerjaan ini harus mengirimkan CV dan atau profil organisasi, proposal teknis (tidak lebih dari 5 halaman), dan proposal anggaran kepada anggita.paramesti@ykan.or.id dan fkairupan@ykan.or.id selambat-lambatnya pada tanggal 10 Maret 2023. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi.